

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR UNIT
CIBADAK KOTA BANDUNG**

***THE EFFECT OF GOVERNMENT POLICY IMPLEMENTATION ON
THE EFFECTIVENESS OF THE PEOPLE'S BUSINESS CREDIT
PROGRAM IN. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) OFFICE
UNIT CIBADAK KOTA BANDUNG***

Mirawati¹, Soni G. Somali²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung, Peneliti menduga belum Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung dipengaruhi oleh variabel Implementasi Kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung.”

Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam Sabarsono (2011; 90-92), berdasarkan faktor-faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun untuk variabel Efektifitas peneliti mengacu pada pendekatan teori sebagaimana dikemukakan Siagian (1998:151) yaitu Tercapainya tujuan dan sasaran, Ketepatan waktu pencapaian sasaran dan penyelesaian kegiatan dan pemanfaatan sumber-sumber secara optimal. Berdasarkan pendekatan teori teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (*explanatory survai method*) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Pemerintah dengan Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

ABSTRACT

The problem in this research is the not optimal yet Program Kredit Usaha Rakyat in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Bandung, Researchers suspect not yet at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Office Unit Cibadak Bandung influenced by Policy Implementation variables. Based on the problem, the formulation of the proposed problem is: "How much influence the Implementation of Government Policy on the Effectiveness Program Kredit Usaha Rakyat in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Bandung".

The research problem analysis was conducted by using the Policy Implementation approach of Edward III in Sabarsono (2011: 90-92), based on Communications, Resource, Disposition and Bureaucracy Structure factors. As for the variable Effectiveness of researchers refers to the theory approach as proposed Siagian (1998: 151) namely Achievement of goals and objectives, Timeliness of goal achievement and completion of activities and utilization of resources optimal. Based on the theory theory approach, the proposed hypothesis is: "The magnitude of influence of Government Policy Implementation on the Effectiveness Program Kredit Usaha Rakyat in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Bandung determined by the implementation of dimensions Communication, Resources, Disposition and Structure Bureaucracy".

The method used in this research is explanatory survey method (explanatory survey method) while the source of data collection by using literature study and field study with data collection techniques using questionnaires, observations, and interviews. Sampling technique used is Simple Random Sampling. The data analysis technique used is Simple Linear Regression.

Based on the results of data processing conducted obtained research results that show a strong and significant relationship between Government Policy Implementation with Effectiveness Program Kredit Usaha Rakyat in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Bandung. Thus the hypothesis proposed in this research is empirically tested.

Keywords: *Policy Implementation, Effectiveness of People's Business Credit*

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK Peningkatan akses pada sumber pembiayaan yaitu pengembangan kewirausaha,

peningkatan pasar produk UMKMK, reformasi regulasi UMKMK.

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan nasional yang berkaitan dalam pemerataan dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta menunjang berjalannya roda perekonomian bahkan dalam bidang perekonomian menjadi salah satu yang paling berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai lembaga pembiayaan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat misalnya dalam usaha mikro kecil dan menengah dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. BRI juga mampu memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja tersebar sangat luas di Indonesia dan memiliki sasaran kedepan dalam pengembangan perekonomian masyarakat sebagai langkah awal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKM) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit Lembaga penjaminnya adalah PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Pada tahun 2015 dan 2016 Pemerintah Indonesia gencar mengucurkan dana kredit untuk memajukan UMKM, dengan program KUR yang memberikan suku bunga murah yaitu dari 9% efektif per tahun setara dengan bunga flat 0,4% per bulan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro merupakan kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan yang dipersyaratkan. Tentu disini ada risiko yang harus di hadapi pemerintah dan harus menyaring calon nasabah agar nantinya tidak menjadi nasabah NPL, namun bisa memberikan kontribusi dalam memberi profitabilitas pada perusahaan, karena pada dasarnya tujuan bank adalah mencari laba dengan menyalurkan kredit dari dana yang Luh diperoleh dari pihak ketiga.

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No S.21-DIR/ADK/08/2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dijelaskan bahwa, PT BRI (Persero) Tbk, adalah perusahaan yang memberikan penjaminan yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penjamin KUR Mikro Sasaran KUR Mikro sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direksi DIR/ADK/08/2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung sejak tahun 2007 merupakan salah satu kantor unit PT BRI (Persero) yang menyediakan pinjaman kredit modal kerja kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak melalui Kredit Usaha Rakyat. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2016. Untuk kelancaran KUR PT BRI (Persero) Unit Cibadak tidak luput dari proses penyaringan calon nasabah agar nantinya tidak menjadi nasabah NPL. Jumlah nasabah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilayani oleh PT BRI (Persero) Unit Cibadak Kota Bandung pada tahun 2015 sampai dengan 2016 sebanyak 370 debitur.

Namun berdasarkan hasil peninjauan awal melalui observasi, memperlihatkan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang diselenggarakan di Kantor Unit PT BRI (Persero) Cabang Cibadak dalam realisasi Kredit Usaha Rakyat yang dilaksanakan di PT BRI (Persero) Unit Cibadak pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 dan 2016 belum efektif. Dimana pada tahun 2015 dan 2016 rata-rata jumlah nasabah KUR yang melakukan peminjaman terdapat 115 debitur pembayaran tidak lancar (menunggak).

Indikasi-indikasi lain yang menunjukkan belum efektifnya KUR yang dilaksanakan di PT BRI (Persero) Unit Cibadak Kota Bandung antara lain :

1. Program KUR belum dapat meningkatkan akses pengembangan UMKM & Koperasi
2. Program KUR belum mampu mengupayakan pengangguran / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Adanya nasabah yang mengajukan pinjaman, ternyata setelah melakukan pencairan tidak digunakan untuk usaha yang bersangkutan melainkan untuk usaha oranglain (Saudara).
4. Kurangnya pemantauan dari Petugas Surpior kepada calon debitur yang mengajukan permohonan KUR. Contoh banyak para nasabah yang tidak lancar melakukan cicilan KUR hanya melakukan pembayaran

hanya satu kali karena usaha yang dijalani mengalami gulung tikar lalu nasabah tersebut kabur ke luar kota dan tidak dapat dihubungi.

5. Pengetahuan masyarakat calon debitur KUR kurang memahami prosedur Kredit Usaha Rakyat. Misalnya : Persyaratan pengajuan dari debitur masih banyak yang kurang memenuhi ketentuan yang diberlakukan oleh BRI. Misalnya : untuk debitur yang beralamat di luar Kota Bandung yang tidak menyertakan KTP harus membuat surat pernyataan domisili, tetapi debitur tersebut tidak membuat surat keterangan domisili sebagai bukti bahwa benar bertempat tinggal di alamat tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, dalam penelitian ini maka peneliti menuliskan rumusan masalah yakni seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai kerangka teoritik di dalam penulisan penelitian ini, penulis mengkaji setiap variabel sebagai fokus bahasan yang diteliti. Berikut ini penulis akan menjabarkan keterkaitan antara implementasi kebijakan mengenai efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat . Model hubungan antar konsep ini selanjutnya dapat dianggap sebagai kerangka konseptual yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Selain daripada itu, dalam memenuhi kepentingan penelitian, penulis juga berpedoman kepada beberapa

pendapat para ahli dalam membuat model keterkaitan teori dari masing – masing variabel.

Implementasi kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang diupayakan setelah suatu kebijakan ditetapkan secara legal. Dalam proses kebijakan publik, implementasi merupakan tahapan yang sangat strategis. Tahapan implementasi kebijakan tidak akan terlaksana jika sasaran dan tujuan dari diupayakannya implementasi kebijakan tersebut belum ditetapkan. Tanpa adanya persiapan yang matang dalam mengupayakan implementasi tersebut, maka suatu kebijakan tidak akan berfungsi dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.

Untuk memperlancar proses implementasi kebijakan menurut Haidar, Akib, Antonius, Tarigan dalam Mulyadi, (2016; 48), maka perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Adapun syarat pengelola diseminasi kebijakan ada empat, yakni: Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah dan aturan hukum yang telah ditetapkan, adanya kesadaran untuk menerima dan melaksanakan kebijakan yang dianggap logis, adanya keyakinan bahwa kebijakan tersebut ditetapkan secara sah, adanya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi akan kebijakan yang kontroversial namun bermanfaat bagi kehidupan bernegara.

Sedangkan menurut Jones (2004; 166), untuk melaksanakan proses implementasi kebijakan yang efektif harus mealui tiga kegiatan, yakni: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Kemudian secara lebih detail, Soenarko (1998; 210-215) menjabarkan teori yang dikemukakan oleh Jones tersebut. Organisasi dalam implementasi kebijakan

menurut Jones, ditujukan sebagai pembentukan unit beserta metode yang perlu diterapkan dalam proses implementasi kebijakan agar tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Implementasi menurut teori Jones, sebagai suatu upaya untuk memahami apa yang menjadi maksud dari dibuatnya kebijakan tersebut agar kemudian kebijakan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan. Sedangkan aplikasi dalam implementasi menurut Jones, merupakan upaya diterapkannya segala aturan dan keputusan yang terangkum dalam suatu kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut.

Merujuk pada apa yang telah dikemukakan oleh Malcolm Goggin, Ann Bowman dan James Lester yang dikutip dalam Nugroho (2014; 670), bahwasannya faktor “komunikasi” yang dikaitkan dengan variabel bebas, variabel antara dan variabel terikat dapat menjadi penggerak dalam sebuah upaya implementasi kebijakan.

Sementara Edward III dalam Sabarsono (2011; 90-92) , agar upaya implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif maka setidaknya paling sedikit terdapat empat isu pokok yang harus diperhatikan, yakni:

5. Komunikasi, berkaitan dengan cara penyampaian informasi yang berkaitan dengan isi kebijakan dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi tersebut melibatkan aktor – aktor pembuat kebijakan, para pelaksana dan sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Melalui komunikasi yang dibangun dengan baik, maka diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya distorsi implementasi.

6. Sumber Daya, berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang jika tidak memadai maka akan menghambat jalannya suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya tentang jumlah kuantitas implementor, tetapi juga termasuk kompetensi yang dimiliki implementor serta sumber daya dalam bentuk lainnya, misalnya finansial.
7. Disposisi, berkaitan dengan karakteristik watak yang dimiliki oleh implementor. Misalnya, komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dsb. Disposisi yang baik dapat mempengaruhi potensi sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan akhirnya.
8. Struktur Birokrasi, berkaitan dengan organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah ditetapkannya standarisasi prosedur operasional atau *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Selanjutnya peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan Efektivitas, diantaranya sebagai berikut :

Pengertian efektivitas menurut Handoko (2001:7) adalah “merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas

maupun waktu, orientasinya pada keluaran yang dihasilkan”.

Selanjutnya menurut Yamin (2003:14) “efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan, semakin besar hasil yang dicapai maka akan semakin efektif. Kata kunci efektivitas adalah efektif, karena pada akhirnya keberhasilan perusahaan diukur dengan konsep efektivitas”..

Menurut Yuwono (2002:23), pengukuran efektivitas atau kinerja adalah “tindakan pengukura dilakukan berbagai aktivitas dalam rantai yang ada pada perusahaan/organisasi, yang hasil pengukurannya akan digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan tingkat saat organisasi memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian”.

Kemudian menurut Siagian (1998:151) kriteria efektivitas terdiri dari:

1. Tercapainya tujuan dan sasaran. Apabila tujuan dan organisasi tercapai maka dikatakan efektivitas serta bobot pencapaian tujuan dan sasaran menunjukkan efektif.
2. Ketetapan waktu pencapaian sasaran dan penyelesaian kegiatan. Apabila pencapaian sasaran dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu atau dapat dilakukan sebelum waktu yang telah ditetapkan maka disebut efektif.
3. Pemanfaatan sumber-sumber secara optimal. Apabila sumber-sumber yang tersedia, baik sumber daya maupun sumber lain yang dapat di manfaatkan secara optimal maka disebut efektif. Optimalisasi pemanfaatan sumber-

sumber ini mencerminkan tingkat efektivitasnya.

Mengacu pada kerangka pikir dan batasan – batasan konsep di atas, selanjutnya penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Besarnya Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cibadak Kota Bandung ditentukan oleh pelaksanaan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokras”.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode eksplanasi (*Explanatory Research*) yang dimana data informasi dapat dikumpulkan dari populasi, yang hasil datanyadikumpulkan dan dianalisis untuk dapat mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi atas 2 (dua) sumber yaitu Sumber Data Sekunder

dan Sumber Data Primer. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Variabel Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Untuk memperlihatkan adanya perubahan naik turunnya variabel terikat dipengaruhi keadaan naik turunnya variabel bebas. Dalam penelitian ini, untuk menghasilkan persamaan regresi linear sederhana dilakukan perhitungan dengan menggunakan software komputer yaitu SPSS V.19. Adapun hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perhitungan Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -6.905 | 2.516 | | -2.744 | .008 |
| Implementasi Kebijakan | .804 | .065 | .813 | 12.433 | .000 |

a. Dependent Variable: Efektivitas Program KUR

Berdasarkan tabel di atas dapat dihasilkan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y_{EKUR} = -6,905 + 0,804X_{IK}$$

Dari persamaan regresi linear sederhana yang didapatkan tersebut dapat diinterpretasikan, nilai konstanta (a) sebesar -6,905 itu mengartikan bahwa apabila tidak ada nilai Implementasi Kebijakan maka Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (UR) akan

mengalami penurunan nilai sebesar 6,905 satuan. Kemudian nilai parameter sebesar 0,804 dapat diartikan apabila terjadi kenaikan satu satuan pada Variabel Implementasi Kebijakan maka Variabel Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan naik nilainya sebesar 0,804 satuan, sebaliknya apabila terjadi penurunan satu satuan pada variabel Implementasi Kebijakan maka Variabel Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat

(KUR) juga akan turun nilainya sebesar 0,804 satuan.

Kemudian selanjutnya akan dilakukan analisis nilai korelasi, dimana dengan analisis korelasi tersebut akan diketahui bagaimana nilai dan arah hubungan antara variabel Implementasi Kebijakan dengan Variabel Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perhitungan Korelasi
Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .813 ^a | .662 | .657 | 4.96724 |

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat nilai korelasi/hubungan menunjukkan nilai sebesar 0,813 (pada kolom R). Hal ini berdasarkan intepretasi guilford nilai korelasi sebesar 0,810 berada pada interval korelasi yang kuat dan memiliki arah yang positif, sehingga dapat dikatakan korelasi antara variabel Implementasi Kebijakan dengan Variabel Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kuat dan Searah. Dari tabel di atas, juga dapat dihasilkan nilai besarnya pengaruh yaitu sebesar 0,662 atau 66,2 % (pada kolom R Square). Ini memperlihatkan bahwa pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan terhadap Variabel Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar 66,2% sedangkan sisanya 33,8 % variabel lain yang mempengaruhi variabel Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat

(KUR) diluar Variabel Implementasi Kebijakan yang tidak diteliti.

Selanjutnya analisis terakhir dalam analisis data pada penelitian ini adalah melakukan pengujian hipotesis dengan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : $\rho \neq 0$ Tidak terdapat Pengaruh

Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

H_a : $\rho = 0$ Terdapat Pengaruh Implementasi

Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

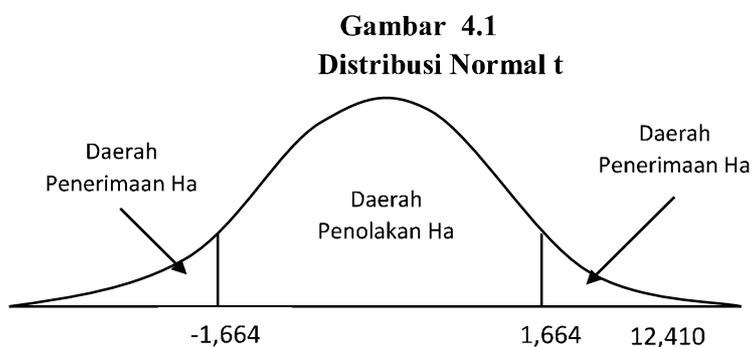
Hipotesis tersebut di atas akan dibuktikan dengan menghitung distribusi student (uji t) yang kemudian akan dibandingkan dengan t-tabel. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$t = rs\sqrt{\frac{N-2}{1-rs^2}}$$

$$t = 0,813\sqrt{\frac{81-2}{1-0,813^2}}$$

$$t = 12,410$$

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan t-tabel, dimana dari hasil tabel distribusi t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t-tabel adalah sebesar 1,664. Ini menunjukkan bahwa nilai t hitung yaitu sebesar 12,410 lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 1,664 yang dapat digambarkan dalam kurva distribusi normal sebagai berikut :



Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai t hitung berada pada daerah penerimaan H_a , artinya bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima. Kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Variabel Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

4.2 Interpretasi Hasil Penelitian

Dalam mengkaji Implementasi Kebijakan Pemerintah telah banyak model-model yang dikemukakan oleh para pakar, tetapi untuk menganalisis Implementasi Kebijakan, peneliti menggunakan pendekatan teori sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2008:125), yang terdiri dari 4 (empat) faktor-faktor implementasi kebijakan yang terdiri dari: Komunikasi,

Sumberdaya, Disposisi/ Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Dimana indikator yang diajukan seluruhnya berjumlah 13 (tigabelas) indikator. Dari masing-masing faktor yang terdapat dalam variabel Implementasi Kebijakan dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan pengolahan data, diperoleh nilai pada Variabel Implementasi Kebijakan pada faktor Komunikasi adalah sebesar 1033. Nilai tersebut berada pada interval penilaian Cukup baik, Hal ini menunjukkan bahwa dimensi Komunikasi dari variabel implementasi kebijakan sudah cukup baik dilaksanakan oleh pimpinan BRI kepala unit cibadang. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh , Edward III dalam Winarno (2008 : 210), adalah

sebagai berikut: Komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Ada tiga hal penting menyangkut komunikasi, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, petunjuk pelaksanaan harus dapat dipahami para pelaksana, perintah untuk mengerjakan atau melaksanakan kebijakan harus diterapkan kepada aparat dan perintah harus jelas dan konsisten.

Komunikasi merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan untuk melihat keberhasilan implementasi peraturan pemerintah terhadap kebijakan KUR di BRI unit Cibadak Bandung dari segi transmisi, kejelasan maupun konsistensi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan kepala unit Cibadak Bandung menyebutkan bahwa untuk melaksanakan aturan kebijakan BRI No 1 Tahun 2015 tentang peraturan pemerintah dan kebijakan kredit usaha rakyat melalui faktor komunikasi menyebutkan bahwa faktor komunikasi telah sesuai dengan peraturan ataupun kebijakan yang telah sesuai sop pada surat edaran yang berlaku. Observasi yang peneliti lakukan sejalan dengan pernyataan tersebut melihat bahwa implementasi kebijakan kredit usaha rakyat melalui faktor komunikasi telah berjalan dengan maksimal. Hal tersebut karena implementasi kebijakan kredit telah sesuai dengan sop pada surat edaran.

Sumber daya manusia (SDM) yang berada di BRI unit Cibadak dalam melaksanakan kebijakan KUR jika dilihat dari segi ketersediaan aparat CS, teller dan pimpinan, sarana prasarana untuk melaksanakan Kebijakan KUR.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan BRI unit Cibadak Bandung menyebutkan bahwa, untuk melaksanakan aturan kebijakan KUR tentang kebijakan KUR melalui faktor Sumberdaya adalah kebijakan KUR indicator sumber daya telah sesuai dengan sop pada surat edaran. Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan sejalan dengan pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pada faktor sumberdaya di BRI unit Cibadak Bandung berdasarkan observasi yang dilakukan kebijakan KUR indicator sumber daya telah sesuai dengan SOP pada surat edaran yang berlaku.

Pada konteks Implementasi Kebijakan melalui dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana, hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh nilai pada Variabel Implementasi Kebijakan pada faktor Disposisi/Sikap Pelaksana berada pada interval penilaian Cukup baik, Artinya pimpinan kepala unit BRI Cibadak Bandung telah sepenuhnya melaksanakan aturan variabel implementasi kebijakan melalui dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana Menurut Edward III dalam Winarno (2008:125) menyatakan bahwa Disposisi/Sikap Pelaksana (Disposition) yang diartikan sebagai kecenderungan dari para pelaksana kebijakan yang menunjukkan keinginan dan kesepakatan di kalangan pejabat/administrator maupun pelaksana untuk menerapkan kebijakan bukan hanya mengetahui tugas dan memiliki kemampuan saja. Dalam implementasi kebijakan KUR, adanya sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya menjalankan kebijakan KUR pada BRI unit cibadak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Kepala Unit Cibadak Bandung menyatakan bahwa, untuk melaksanakan aturan kebijakan KUR melalui faktor Disposisi/Sikap Pelaksana telah sesuai dengan sop pada surat edaran. Berdasarkan Hasil observasi peneliti melihat bahwa implementasi kebijakan pada faktor Disposisi/Sikap Pelaksana yang terdiri dari 3 indikator tersebut sudah cukup baik. hanya saja harus ditingkatkan lagi dikarenakan masih adanya petugas yang Disposisi/Sikap Pelaksananya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Struktur birokrasi terutama pada mekanisme yang dijalankan oleh perangkat aparat BRI unit Cibadak dalam melaksanakan wewenangnya dan tanggung jawab pada masyarakat akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh BRI Unit Cibadak. Mekanisme pelaksanaan Kebijakan KUR untuk masyarakat yang harus melibatkan unit satuan tugas sangat berpengaruh besar pada rentang koordinasi yang tidak terlalu kompleks. Keadaan ini menyebabkan aktivitas organisasi menjadi lebih fleksibel sehingga setiap tahap-tahap birokrasi yang ada dalam prosedur pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diselesaikan secara lebih cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan kepala unit menyatakan bahwa, untuk melaksanakan aturan kebijakan KUR melalui faktor Struktur Birokrasi telah sesuai dengan sop pada surat edaran. Berdasarkan Hasil observasi peneliti melihat bahwa implementasi kebijakan melalui faktor struktur birokrasi memperlihatkan bahwa kebijakan KUR

melalui faktor stuktur telah sesuai dengan sop pada surat edaran.

Berdasarkan hasil pengujian, Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan KUR terhadap Variabel dimensi tercapainya tujuan sasaran, dimensi ketepatan waktu dan dimensi pemanfaatan sumber sumber rata rata sebesar sebesar 63,9% sedangkan sisanya 36,1 % variabel lain yang dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti variabel pengendalian. Alasan peneliti menerapkan variabel pengendalian sebagaimana temuan peneliti dilapangan terkait dengan kebijakan KUR di BRI unit Cibadak Bandung tidak berjalan efektif, misalnya, masih banyak bagi warga masyarakat yang kurang berpartisipasi aktif dalam peraturan pemerintah. Banyak warga masyarakat tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti apabila ada kebijakan pemerintah yang digunakan untuk menaikan suku Bunga untuk menekan inflasi sehingga suku bunga pada bank dapat mempengaruhi peminat masyarakat yang termasuk UMKMK untuk menerima pinjaman modal, sehingga dapat tidak tercapainya Tujuan KUR.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat di BRI Kantor Unit Cibadak Kota Bandung.

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah memberi pengaruh terhadap

Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat di BRI Kantor Unit Cibadak Kota Bandung, melalui faktor-faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

Pengaruh yang kuat antara variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah dengan Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat di BRI Kantor Unit Cibadak Kota Bandung, serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat di BRI Kantor Unit Cibadak Kota Bandung. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah yang turut mempengaruhi Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat di BRI Kantor Unit Cibadak Kota Bandung yakni sebesar 33,8 %.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Hasil dari penelitian ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variabel atau dimensi-dimensi selain implementasi kebijakan yaitu variabel pengendalian, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian manajemen pemerintahan.

5.2.2 Saran Praktis

Aksara

Koswara, E. 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan Press.

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Program Kredit Usaha Rakyat di BRI Kantor Unit Cibadak Kota Bandung, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

5. Disarankan kepada Kepala BRI Kantor Unit Cibadak lebih jelas dalam menyampaikan informasi program Kredit Usaha Rakyat kepada aparatur pelaksana sehingga aturan kebijakan mengenai Kredit Usaha Rakyat dapat disampaikan kepada nasabah dengan jelas.
6. Sebaiknya Kepala BRI Kantor Unit Cibadak melengkapi Sarana prasarana dalam penyampaian informasi Kredit Usaha Rakyat Kepada nasabah.
7. Disarankan kepada aparat BRI Kantor Unit Cibadak untuk memiliki komitmen dalam melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan sebagaimana tugas pokok , visi, misi, dan peraturan pemerintah.
8. Hendaknya Kepala BRI Kantor Unit Cibadak lebih meningkatkan kerjasama dengan para aparatur untuk

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Hoogerwerf, A.; R.L.L Tobing (pen.) 1983. *Ilmu Pemerintahan* Jakarta Erlangga. Islmay, Irdan 2000. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan* Negara, Jakarta, Bumi
- Steers ,Richard M,1998,*Efektivitas Organisasi Terjemahan Jakarta,Ppm,Erlangga.*

Zainun, Buchari 1998. Manajemen dan Motivasi. Edisi Revisi. Cetakan 5. Jakarta: Balai Aksara

Dokumen

Republik Indonesia, 2014. Undang-undang No 23 Tentang Pemerintahan Daerah

-----2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*

Jakarta : Sekretariat Negara RI.Kota Bandung, 2013.
Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
----- . 2007 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 Tentang *Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung*